



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISDYATMIKO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
3. NHK : 826096

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.729.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/161 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
3. Tanah Seluas 867 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 309.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **536.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI ZX250 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000



6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
7. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.596.566.888

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.886.066.888

III. HUTANG Rp. 241.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.645.066.888

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.